

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis moneter yang melanda hampir ke seluruh negara, terutama di negara-negara berkembang di kawasan Asia, termasuk Indonesia, terjadi sejak dasa warsa terakhir ini. Pada sektor pelaku ekonomi, baik milik negara maupun swasta, menunjukkan kinerja yang rendah, sehingga tidak mampu memberi kontribusi secara optimal, baik untuk kepentingan para pemilik, *stakeholders*, karyawan, masyarakat, maupun pihak terkait lainnya. Para pelaku ekonomi swasta pada umumnya menunjukkan kesalahan manajemen, sehingga tidak memiliki keunggulan atau daya saing yang kuat di pasar internasional, bahkan kondisi internal perusahaan masuk dalam kualifikasi tidak sehat. Pada pelaku ekonomi milik negara, sudah bukan merupakan rahasia umum, bahwa sebagian besar kinerja Badan Usaha Milik Negara jauh dari apa yang diharapkan masyarakat, kontribusi BUMN saat ini masih belum terasa bagi masyarakat, padahal BUMN saat ini memiliki potensi untuk berkembang dan memperoleh keuntungan dengan kepemilikan aset yang besar (Sedarmayanti, 2012:50).

Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD), lembaga yang ditunjuk Otoritas Jasa keuangan (OJK) untuk melakukan penilaian tata kelola perusahaan menurut *ASEAN Governance Scorecard* berpendapat, maraknya kasus korupsi mulai dari PT PAL, PT Garam, hingga PT Askrido yang menyebabkan pencopotan direktur utama perusahaan tersebut karena kurang

bagusnya tata kelola (*Good Corporate Governance*) yang memenuhi standar internasional. Standar GCG mengharuskan perusahaan aktif dalam memerangi korupsi. Saat ini hanya emiten besar saja yang sudah mengungkapkan *policy* tentang pelarangan pemberian *bribing* dan gratifikasi. Adapun dalam melakukan penilaian GCG tahun lalu, IICD menilai lebih dari 100 perusahaan publik di Indonesia dengan kapitalisasi market terbesar. Namun masih sedikit yang menerapkan GCG, termasuk dalam memerangi korupsi. Regulasi yang ada memang mengharuskan implemmentasi GCG di semua perusahaan, terutama perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan diawasi oleh OJK, namun tidak difungsikan dengan baik. Perlu adanya edukasi dan publikasi mengenai manfaat tata kelola terhadap kinerja keuangan dan lain-lain. Adapun pada 2015, Indonesia berhasil menempatkan dua perusahaan publik, yaitu PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Danamon Tbk masuk ke dalam 50 Perusahaan dengan GCG Terbaik di Asean. Namun, raihan tersebut masih kalah dengan Thailand yang bisa menempatkan 23 perusahaan dalam daftar tersebut (m.kumparan.com, 19/07/17).

Trend masa kini di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah privatisasi (secara sederhana, penjualan saham perusahaan publik milik pemerintah atau BUMN menjadi korporasi swasta yang menguntungkan melalui *listing* di pasar modal). Trend ini turut mengangkat isu *corporate governance*. Trend korporasi lainnya adalah meningkatnya tuntutan *checks and balances* di tingkat dewan, yakni pengawasan dan keseimbangan antara dewan komisaris, komisaris dan auditor, masalah nominasi dan kompensasi yang diterima dewan. Khususnya di Indonesia yang menganut *two-tier system*, tarik menarik antara dewan komisaris

dan dewan direksi sering menghasilkan di satu sisi dewan komisaris yang terlalu aktif atau terlalu pasif sehingga menghambat fungsi pengawasan yang diembannya. Dengan perkembangan isu *corporate governance* yang tadinya hanya bersifat marginal, kini menjadi isu sentral, oleh sebab itu dibutuhkan pemahaman pemahaman yang memadai tentang *corporate governance* (Sedarmayanti, 2012:52).

GCG secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stakeholder*. Secara singkat, ada empat komponen utama yang diterapkan dalam konsep ini, yaitu *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip GCG secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan. (Sutedi, 2011:2).

Prinsip GCG menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 3, terdiri dari 5 prinsip yang tercantum pada Peraturan Menteri tersebut, yaitu:

- a. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

- c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- d. Kemandirian (*Independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. Kewajaran (*Fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia saat ini berbagai kalangan, terutama para pemerhati dan pelaku-pelaku bisnis telah merasakan pentingnya melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan bisnis sehari-hari (Sutedi, 2011:55).

Kualitas sumber daya manusia dapat mempengaruhi persaingan dalam meningkatkan usaha terhadap kemajuan suatu perusahaan. Dengan menggunakan sistem manajemen yang baik dapat dijadikan objek dalam meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu alat manajemen kualitas yang bisa digunakan adalah *Total Quality Management (TQM)*. Perusahaan yang menerapkan TQM bertujuan untuk memenuhi kepuasan dan harapan pelanggan, tuntutan perubahan lingkungan dan tuntutan perusahaan sendiri. Penerapan TQM yang efektif membawa pengaruh positif yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi organisasi. Dengan adanya penerapan TQM yang memfokuskan pada layanan jasa serta adanya keterlibatan tenaga kerja diharapkan dapat mempengaruhi kinerja dari perusahaan atau organisasi tersebut (Alhudri & Meyzi, 2015).

Banyak para ahli yang mengemukakan pendapat mengenai pengertian dan konsep mengenai TQM. TQM adalah suatu perbaikan berkelanjutan yang mana hal ini adalah sesuatu yang mendasar sifatnya bagi pengembangan proses manufaktur yang sempurna. Memproduksi produk dan pengurangan pemborosan yang sesuai dengan standar merupakan dua tujuan umum perusahaan (Hansen & Mowen, 2009:17).

TQM sendiri secara garis besar disimpulkan sebagai strategi dan filosofi manajemen yang coba mengintegrasikan semua fungsi organisasi yang melibatkan seluruh manajer dan karyawan untuk saling bekerja sama didalam meningkatkan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan sehingga dapat mengoptimalkan kinerja karyawan dari perusahaan tersebut (Alhudri & Meyzi, 2015).

Penerapan TQM dalam suatu perusahaan dapat memberikan manfaat utama yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan laba juga kualitas dari perusahaan yang bersangkutan. Penerapan TQM yang terencana dan terarah diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan (Poernomo, 2006).

Untuk mencapai tujuan kinerja karyawan maka dapat dinilai dari tiga hal, meliputi: penilaian harus mempunyai hubungan dengan pekerjaan, adanya standar pelaksanaan kerja, praktis (mudah dipahami atau dimengerti karyawan atau penilai) (Notoadmojo, 2009:143). Sedangkan standar kinerja adalah target, sasaran, atau tujuan upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu. Dalam melaksanakan pekerjaannya, karyawan harus mengarahkan semua tenaga, pikiran, ketrampilan, pengetahuan, dan waktu kerjanya untuk mencapai apa yang ditentukan oleh standar kinerjanya (Wirawan, 2009:67).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, maka dilakukan penelitian berjudul “Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Total Quality Management* terhadap Kinerja Karyawan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang ingindibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja karyawan?
2. Apakah *total quality management* berpengaruh terhadap kinerja karyawan?
3. Apakah *good corporate governance* dan *total quality management* berpengaruh terhadap kinerja karyawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
2. Untuk menguji apakah *total quality management* berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
3. Untuk menguji apakah *good corporate governance* dan *total quality management* berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata dalam pengembangan ilmu sistem pengendalian manajemen khususnya yang berkaitan dengan *total quality management* dan *good corporate governance*.

2. Bagi Praktisi Bisnis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi pemahaman atas praktik *total quality management* dan *good corporate governance* sebagai salah satu strategi untuk pencapaian tujuan perusahaan.

b. Bagi Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam keputusan manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji bidang yang sama sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi pendukung maupun pembanding.